

I.PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kurang lebih 32 tahun Orde Baru berdiri, dan selama pemerintahan itu berlangsung telah disaksikan tata pola penguasa negara. Jika dilihat kembali awal berdirinya Orde Baru maka tidak terlepas dari berbagai protes masyarakat Seperti yang diketahui bahwa Orde Baru adalah untuk meluruskan kembali segala penyelewengan dan penyimpangan yang dilakukan Orde Lama serta melakukan koreksi dan meluruskan kembali penyelewengan yang telah terjadi dalam penyelenggaraan negara dan mengenai kekuasaan yang dilakukan pemerintah.

Rezim yang berperan sebagai penyelamat kekacauan ekonomi-politik yang menyengsarakan rakyat banyak. Sejak muncul pada tahun 1965, proyek birokrasi yang terbesar adalah mengatasi kekacauan politik agar tercapai cita-cita pembangunan bangsa menuju masyarakat makmur dan sejahtera.

Prioritas pembangunan diarahkan pada peningkatan pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi dan investasi, serta ukuran-ukuran ekonomi yang lain (Budi Winarno, 2007 : 32). Dengan memperluas akses sebesar mungkin pada aliran pinjaman asing melalui lembaga-lembaga ekonomi dunia. Selain usaha untuk mendapatkan bantuan asing, strategi lain yang digunakan adalah menstabilisasi kehidupan politik, hal ini membuat keterlibatan masyarakat dalam mekanisme politik yang dikorbankan pada titik yang terendah.

Menurut Harold Crouch program stabilitasi kehidupan politik tidak dapat dilepaskan dari peranan militer yang sangat mempunyai peranan dominan, serta menjadi andalan dalam menghadapi berbagai persoalan stabilitas nasional (Harold Crouch, 1999 : 45). Kuatnya militer inilah yang sangat didukung oleh kemampuan negara dalam membiayai militer yang berasal dari hasil penjualan minyak.

Pada tahun, 1970-an dan tahun 1980-an Indonesia mengalami lonjakan yang sangat besar. Hal ini disebabkan karena kuatnya peranan militer dan masalah perekonomian pada masa pemerintahan Orde Baru. Akibat dari rekayasa yang dijalankan, maka hubungan antara negara dan masyarakat menghasilkan ketegangan yang terus terjadi dalam perjalanan sejarah rezim Orde Baru.

Kondisi kesenjangan sosial yang ditandai dengan perbedaan taraf hidup yang begitu besar. Sementara sebagian besar masyarakat harus sabar menggali kehidupan yang penuh kekurangan, dan sebagian yang lain para kaum elit politik pada masa pemerintahan Orde Baru melengkapi gaya hidupnya dengan sangat mewah. Kondisi ini yang pada akhirnya menjadi bencana sosial yang siap mengancam karena memburuknya kondisi ekonomi pada saat itu.

Krisis moneter yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 dan memicu terpuruknya ekonomi Indonesia menjadi penyulut kejatuhan rezim Orde Baru, karena berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Berawal dari besarnya gerakan mahasiswa, membuat Orde Baru tidak dapat mempertahankan kekuasaan yang dipegangnya selama lebih dari 3 dekade.

Gerakan mahasiswa yang menuntut reformasi menandakan terjadinya krisis legitimasi atau dengan kata lain pengakuan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin berkurang, tentunya terdapat permasalahan-permasalahan yang menjadi penyebab terjadinya krisis tersebut. Menurut Ramlan Subakti krisis legitimasi terjadi karena disebabkan oleh empat hal, yaitu :

1. prinsip kewenangan yang beralih pada prinsip kewenangan yang lain. Artinya prinsip yang selama ini digunakan tidak lagi diakui oleh masyarakat, dan masyarakat sudah menemukan prinsip kewenangan yang lain yang dianggap lebih baik sehingga pemerintah yang menadasarkan diri pada prinsip kewenangan lama akan kehilangan dukungan.
2. persaingan yang sangat tajam dan tidak sehat tetapi juga disalurkan melalui prosedur yang seharusnya di antara para pemimpin pemerintahan sehingga terjadi perpecahan dalam tubuh pemerintahan.
3. pemerintah tak mampu memenuhi janjinya sehingga menimbulkan kekecewaan serta keresahan di kalangan masyarakat.
4. sosialisasi tentang kewenangan yang mengalami perubahan. (Ramlan Subakti 1992 : 99)

Prinsip kewenangan yang mulai beralih terjadi karena terpilihnya Soeharto sebagai presiden sampai ke tujuh kalinya, dan hal ini yang menimbulkan pengakuan dalam masyarakat menurun. Kuatnya dominasi negara dan birokrasi dalam mengontrol kehidupan masyarakat membuat pembangunan politik pada masa Orde Baru tidak berjalan baik sebagaimana mestinya. Represi politik yang terus dilakukan dalam rangka meredam kritisi tajam dari masyarakat membuat masyarakat dari berbagai elemen menginginkan adanya prinsip kewenangan yang lain yang bertujuan lebih memperhatikan kesejahteraan masyarakat.

Keinginan dalam merubah prinsip kewenangan oleh masyarakat dilakukan karena minimnya partisipasi politik terhadap pembangunan politik pada masa pemerintahan Orde Baru, karena mereka pun menginginkan adanya keikutsertaan masyarakat dalam menentukan para wakil yang duduk di kursi kepemimpinan.

Pada masa kejayaan rezim Orde Baru, negara berada dalam puncak kekuasaannya yang paling kuat, akan tetapi pada kalangan masyarakat menjadi titik kelemahan akibat dari tidak terpenuhinya tingkat kesejahteraan masyarakat (A. Prasetyantoko, 1999 : 11).

Selain adanya prinsip kewenangan yang beralih, penyebab lain adalah adanya persaingan yang dilakukan oleh sejumlah elit politik dalam merebutkan kekuasaan. Persaingan yang berdampak pada perpecahan antar kaum elit politik juga yang menyebabkan terjadinya kelumpuhan pemerintahan sehingga masyarakat tidak akan menaati kewenangan yang ada. Dengan adanya teknologi yang semakin maju, dan pendidikan yang semakin tinggi, membuat masyarakat ikut menilai segala tindakan yang dilakukan oleh kaum elit politik tersebut.

Persaingan elit politik tersebut terlihat pada persaingan dingin yang terjadi antara Prabowo dan Wiranto dalam memperoleh kekuasaan pada saat pemerintahan Orde Baru. Karena keduanya merupakan orang terdekat dari presiden Soeharto (Fadli Zon, 2004 : 26).

Munculnya krisis legitimasi yang terjadi pada saat pemerintahan Orde Baru adalah tidak terpenuhinya janji-janji pemerintah sehingga menimbulkan kekecewaan dan keresahan masyarakat. Kekecewaan dan keresahan berakibat pada memudarnya dukungan masyarakat.

Dengan naiknya Soeharto menjadi presiden tentunya melakukan sosialisasi terlebih dahulu sampai pada kalangan masyarakat ke bawah, di mana dalam kampanye nya disebutkan akan ada perbaikan-perbaikan pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Akan dengan berjalannya waktu pemerintah melupakan sendiri janji-janji tersebut.

Pada tahun 1997 terjadinya PHK besar-besaran terhadap pekerja, hal ini yang mengakibatkan banyaknya tingkat pengangguran serta dampak lainnya seperti meningkatnya tingkat kemiskinan, dan menurunnya angka kesehatan, hal ini menunjukkan tingkat kesejahteraan yang semakin menurun (Denny, 2006 ; 76).

Prinsip kewenangan yang beralih, persaingan antar elit politik, dan tidak terpenuhinya janji-janji pemerintahan sebab lainnya terjadinya krisis legitimasi adalah sosialisasi kewenangan yang mengalami perubahan. Apabila selama ini anggota masyarakat disosialisasikan oleh orang tua dan lingkungan untuk tidak hanya taat dan mengharapkan sepenuhnya dari pihak yang berwenang maka dengan meluasnya pendidikan dan media massa pola sosialisasi tentang kewenangan juga berubah.

Melihat fenomena yang terjadi di atas, mengenai faktor penyebab atau indikasi terjadinya penurunan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, maka penulis tertarik untuk mengkaji topik dari skripsi ini mengenai "Krisis Legitimasi Pada Akhir Pemerintahan Orde Baru".

1.2 Analisis Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pembangunan politik Orde Baru yang bertujuan untuk mengoreksi total atas penyimpangan yang dilakukan pada masa pemerintahan Soekarno serta perbaikan dalam segala bidang.
- b. Adanya sistem Kewenangan yang beralih
- c. Munculnya persaingan yang terjadi antara elit politik dalam memperoleh kekuasaan.
- d. Tidak terpenuhinya janji-janji pemerintah terhadap masyarakat.
- e. Adanya proses sosialisasi yang mulai berubah.
- f. Munculnya krisis legitimasi pada pemerintahan Orde Baru

1.2.2. Batasan Masalah

Agar dalam penelitian ini masalah yang diangkat tidak terlalu meluas, maka berdasarkan identifikasi masalah, penulis membatasi masalah terjadinya krisis legitimasi pada akhir pemerintahan Orde Baru.

1.2.3 . Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah proses krisis legitimasi yang berlangsung pada akhir pemerintahan Orde Baru?

1.3 .Tujuan, Kegunaan dan Ruang Lingkup Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah jawaban atas masalah yang telah dirumuskan di atas.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui jalannya proses terjadinya krisis legitimasi pada akhir pemerintahan Orde Baru.
- b. Untuk mengetahui bentuk dari krisis legitimasi pada akhir pemerintahan Orde Baru.
- c. Untuk mengetahui akibat terjadinya krisis legitimasi.

1.3.2 Kegunaan Penelitian.

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada peneliti maupun pihak-pihak yang membutuhkan. Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Sebagai suplemen bahan ajar bagi Guru sejarah Sekolah Menengah Atas kelas XII semester 2
2. Sebagai wacana memperluas pengetahuan mahasiswa dan calon guru tentang sejarah Indonesia khususnya mengenai krisis legitimasi pada akhir pemerintahan Orde Baru
3. Untuk lebih memahami proses terjadinya krisis legitimasi.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

1. Subjek Penelitian

Adapun subjek pada penelitian ini adalah krisis legitimasi pada masa pemerintahan Orde Baru, banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, diantaranya tidak berjalannya system demokrasi pada saat itu yang menyebabkan terbatasnya partisipasi rakyat untuk ikut serta dalam kelangsungan system kerja pada masa pemerintahan Orde Baru. Selain itu kekuasaan pemerintah daerah di batasi dengan aturan-aturan dari pemerintah pusat, dari hal-hal tersebut di atas maka lambat laun masyarakat kurang percaya akan kerja dari pemerintahan Orde Baru dengan kata lain terjadilah krisis Legitimasi pada masa pemerintahan Orde Baru.

2. Tempat Penelitian

Karena penelitian ini termasuk pada kategori penelitian masa lampau (historis), maka penulis menggunakan perpustakaan sebagai tempat utama dalam melakukan penelitian diantaranya perpustakaan Program Studi Pendidikan Sejarah dan Perpustakaan Universitas Lampung serta Perpustakaan Daerah Lampung.

3. Temporal Waktu

Skripsi yang berjudul "Krisis Legitimasi Pada Akhir Pemerintahan Orde Baru" ini terjadi pada tahun 1998 tepatnya pada saat pemerintahan Orde Baru berakhir yaitu pada tanggal 21 Mei 1998. Pemerintahan Orde Baru berakhir disebabkan karena kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah telah berkurang akibat penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru.

4. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian dalam Skripsi ini dilakukan pada tahun 2010.

5. Bidang Ilmu

Yaitu Sejarah , karena dalam skripsi yang berjudul ''Krisis Legitimasi Pada Akhir Pemerintahan Orde Baru'' ini mengkaji tentang kekuasaan dan sistem pemerintahan. Kurangnya kepercayaan yang terjadi pada akhir pemerintahan Orde Baru terjadi karena terdapatnya penyimpangan yang terjadi seperti KKN, hukum yang semakin lemah serta pembangunan yang tidak seimbang, hal ini yang memicu terjadinya kerusuhan di berbagai daerah yang mendesak Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya.